<KOP SURAT SATKER> ….(1)

Nomor : …….(2) …….(3)
Sifat : …….(4)
Lampiran : …….(5)
Hal : Penunjukan *User* Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN

Yth. Kepala KPPN Pangkalan Bun

Sehubungan dengan Pendaftaran User Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN, bersama ini kami sampaikan data pegawai yang ditunjuk sebagai *user* aplikasi Gaji Satker Modul PPNPN sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Status Pegawai	Email	Kode Satker	Akun Digit	Level
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Selanjutnya sebagai dokumen pendukung penunjukan pegawai sebagaimana tersebut di atas, bersama ini kami lampirkan **foto copy KTP** pegawai dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kuasa Pengguna Anggaran {satker}

(14)

……..…….. (15)

NIP

……. (16)

<KOP SURAT SATKER> ….(1)

KEPUTUSAN KEPALA {satker} (1)

NOMOR : KEP-……. (2)

TENTANG

PENETAPAN DAN PENUNJUKAN USER APLIKASI GAJI SATKER WEB MODUL PPNPN PADA SATUAN KERJA

.....{satker}..... (3)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN {satker} (4)

Menimbang : Bahwa dalam rangka persiapan Piloting Pembayaran Penghasilan PPNPN untuk satuan kerja melalui Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN yang akan dimulai pada Tahun Anggaran 2022, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN pada Satuan Kerja …… (5)

Mengingat :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 jo. PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

c. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 jo. PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah;

e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2020 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Kepala ....{satker}... (7) Tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN Kantor {satker} (8) Tahun Anggaran ....{tahun}.... (9).
Pertama	:	Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN pada Kantor ....{satker}... (10).
Kedua	:	Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : ……. (12)

Pada Tanggal : …… (13)

Kuasa Pengguna Anggaran {satker} (14)

……..…….. (15)

NIP

……. (16)

PENETAPAN DAN PENUNJUKAN USER APLIKASI GAJI SATKER WEB MODUL PPNPN PADA SATUAN KERJA {satker} (3)

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Status Pegawai	Email yg terdaftar dalam Digit	Kode Satker	User Akun Digit	Level
1	{nama} {nip}	PNS/ Non PNS				**PPK (level 3)**
2	{nama} {nip}	PNS/ Non PNS				**Operator (level 2)**

Kuasa Pengguna Anggaran {satker} (22),

…….…….. (23)

NIP ……. (24)

NO	PETUNJUK PENGISIAN
1	Nama Kantor Instansi Terkait
2	Nomor Surat Keputusan sesuai dengan urutan penomoran dan kode unit organisasi dari pejabat yang menandatangani Surat Keputusan
3	Nama Satuan Kerja
4	Nama Kantor Instansi Terkait
5	Nama satuan Kerja
6	Peraturan lainnya yang menjadi dasar pembuatan Surat Keputusan
7	Nama Kantor Instansi Terkait
8	Nama Kantor Instansi Terkait
9	Tahun Anggaran Terkait
10	Nama Kantor Instansi Terkait
11	Jangka waktu berlaku Surat Keputusan (Misal : Selama Tahun Anggaran 2021 atau Selama Diterbitkan Surat Keputusan Baru)
12	Tempat/Lokasi penerbitan Surat Keputusan
13	Tanggal, Bulan dan Tahun penerbitan Surat Keputusan
14	Nama Kantor Instansi Terkait
15	Nama Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
16	NIP Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
17	Nama Kantor Instansi Terkait
18	Nomor Surat Keputusan sesuai dengan urutan penomoran dan kode unit organisasi dari pejabat yang menandatangani Surat Keputusan
19	Tanggal, Bulan dan Tahun penerbitan Surat Keputusan
20	Nama Kantor Instansi Terkait
21	Tahun Anggaran Terkait
22	Nama Kantor Instansi Terkait
23	Nama Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
24	NIP Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan